



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI
KE KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MELIHAT *PROGRESS*
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI BATANG DAN *PROGRESS*
PLTG TAMBAK LOROK
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 2 S.D. 6 MEI 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2023**



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI
KE KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MELIHAT *PROGRESS*
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI BATANG DAN *PROGRESS* PLTG
TAMBAK LOROK
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 2 S.D. 6 MEI 2023

1. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 – 2023 telah melaksanakan Kunjungan Kerja Reses (Kunres) ke ke Semarang Provinsi Tengah dari tanggal 2 sd. 6 Mei 2023. Kunjungan Kerja pada Masa Reses ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR melihat langsung Progres Pembangunan Kawasan Industri Batang (PT Kawasan Industri Terpadu Batang).

PT Kawasan Industri Terpadu Batang adalah perusahaan patungan Tiga BUMN PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau PT KIW, PT Perkebunan Nusantara IX

(Persero) atau PTPN IX, serta Perumda Batang (perusahaan daerah milik Kabupaten Batang). Pembentukan perusahaan patungan ini didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan industri yang kompetitif di Asia Tenggara di lahan seluas 4.300 hektar dan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional.

Komisi VI DPR RI menilai Kunjungan Kerja Reses ini penting, mengingat Informasi yang masuk ke Komisi VI DPR RI, tujuan dibukanya kawasan industri ini adalah untuk menangkap investor asing yang merelokasikan pabriknya dari Tiongkok akibat dari perang dagang Amerika Serikat (AS) – Tiongkok.

Salah satu keunggulan Kawasan Industri Terpadu Batang adalah waktu tempuh perjalanan dari Kawasan Industri Batang menuju Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang adalah sekitar 50 menit. Keunggulan lainnya adalah, kawasan ini berpotensi menyerap 130.000 lapangan kerja pada tahap satu. Tentu diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Keunggulan lainnya adalah, Kawasan Industri Batang ditata dengan rancangan yang berbeda, sehingga dapat lebih menarik investor terutama dari konsep bisnis dan desainnya. Dari informasi tersebut, Komisi VI DPR RI ingin mendapat gambaran langsung sejauh mana progres Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang.

Perlu disampaikan bahwa Kunker Reses Komisi VI DPR RI ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dimana DPR RI dapat mengadakan Kunjungan Kerja sesuai bidangnya.

B. Objek Kunjungan Kerja.

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI pada tanggal 2 – 6 Mei 2023 adalah ke Kota Semarang

dalam rangka melihat *progress* Pembangunan Kawasan Industri Batang Dan *progress* PLTG Tambak Lorok

Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum kunjungan kerja Reses Komisi VI DPR RI menjalankan fungsi pengawasan DPR RI melihat langsung *progress* pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang dan *progress* PLTG Tambak Lorok Selain itu, Komisi VI DPR RI ingin menggunakan fungsi Pengawasan dalam rangka mengetahui kinerja dari BUMN Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Indonesia Power dan PT Phapros Tbk dan hal-hal penting lainnya terkait dengan perkembangan perseroan.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI tanggal 2 – 6 Mei 2023, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, ingin mengetahui langsung dari jajaran Direksi BUMN sebagaimana yang disebutkan di atas, terkait dengan maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses terutama bagaimana manfaat dan kontribusi keberadaannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Komisi VI DPR RI secara khusus juga meminta PT Indonesia Power sebagai perusahaan yang melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok Semarang menjelaskan sejauh mana *progress* pembangunan proyek tersebut. Berdasarkan masukan PLTGU ini tersebut akan menyumbangkan listrik sebesar 779 Megawatt (MW) yang akan menambah pasokan listrik di Jawa Tengah.

D. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Reses Komisi VI DPR RI ke Kota Semarang, Sanggaran, Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

NO	NO. ANGG	N A M A	KETERANGAN
1.	A-189	ARIA BIMA	PIMP. / F.PDIP
2.	A-196	ADISATRYA SURYO SULISTO	F.PDIP
3.	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.	F.PDIP
4.	A-158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	F.PDIP
5.	A-199	Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.	F.PDIP
6.	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.	F-PGOLKAR
7.	A-311	DONI AKBAR, S.E., M.M.	F-PGOLKAR
8.	A-348	TRIFENA M. TINAL, B.Sc.	F-PGOLKAR
9.	A-302	NUSRON WAHID	F-PGOLKAR
10.	A-128	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.	F-P GERINDRA
11.	A-135	HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.	F-P GERINDRA
12.	A-374	H. SUBARDI, S.H., M.H.	F.NASDEM
13.	A-25	SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP.	F-PKB
14.	A-20	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.	F-PKB
15.	A-523	MUSLIM, S.HI., M.M.	F.PD
16.	A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos.	F.PKS
17.	A-499	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.	F-PAN

2. HASIL KUNJUNGAN KERJA RESES

Dalam kunjungan Kerja Reses ke Semarang tanggal 2 – 6 Mei 2023, Komisi VI DPR RI melakukan tatap muka dan pendalaman dengan; 1) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, SE, MM, 2) Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Kementerian BUMN Rachman Ferry Isfianto, 3) Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang Ngurah Wirawan, 4) Direktur Keuangan PT Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang Evi Afiatin, 5) Plt. Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijayakusuma, Riki Indrianto, 6) Direktur Strategi Korporasi dan HCM PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Sinur Linda Gustina, 7) Direktur Hubungan Kelembagaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), M. Arifin Firdaus, 8) Direktur PT Perkebunan Nusantara IX Dodik Ristiawan, 8) Direktur Manajemen Pembangkitan PT Perusahaan Listik Negara (Persero); Adi Lumakso, 9) Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra, 10) Direktur Utama PT Phapros Tbk, Hadi Kardoko, 11) Direktur Keuangan,

Manajemen Risiko dan SDM PT Phapros Tbk, David Sidjabat.

Secara umum, setelah mendengarkan paparan Mitra, Komisi VI DPR RI mengapresiasi pembangunan tahap satu (Fase 1) Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Sebagai Proyek Strategis Nasional diharapkan akan mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Komisi VI DPR RI menyatakan harapan, dengan adanya KITB, diproyeksikan dapat menyerap 282 ribu tenaga kerja dapat segera terwujud. Dalam paparannya di depan Anggota Komisi VI DPR RI, PT Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang Ngurah Wirawan menyatakan hingga saat ini KITB berpotensi menyerap 130.000 lapangan kerja pada tahap satu. Potensi serapan tenaga kerja ini diharapkan mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Batang.

Komisi VI DPR RI juga menyatakan, target penyerapan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang dinilai baik dalam upaya mengatasi angka pengangguran di Jawa Tengah. Namun tentunya harus dipersiapkan dengan matang. Tujuannya agar angkatan kerja Indonesia, khususnya di Jawa Tengah mendapatkan pekerjaan dan tidak hanya menjadi penonton. Untuk itu, tenaga kerja nasional terutama generasi muda yang berasal dari lingkungan sekitar kawasan tersebut harus diutamakan dalam penyerapan tenaga kerja.

Untuk mewujudkan tujuan awal dari dibangunnya Kawasan Industri Terpadu Batang, Komisi VI DPR RI meminta PT KITB memecahkan semua masalah dan tantangan yang dihadapi dengan cara berkolaborasi antara dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang terkait terutama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dinilai penting terutama untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompetitif. Salah satu wujud nyata kolaborasi PT KITB dengan pemerintah daerah harus dilakukan dari tahap perencanaan, persiapan hingga pelatihan tenaga kerja trampil.

Selain itu, Komisi VI DPR RI meminta keberadaan PT KITB di Batang, Jawa Tengah untuk dapat membantu mengatasi masalah di tingkat lokal terutama soal kemandirian kaum perempuan. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan cara memberikan kesempatan kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Hal ini menjadi sorotan Komisi VI DPR RI mengingat tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Provinsi Jawa Tengah dinilai masih rendah.

Berdasarkan informasi awal yang masuk ke DPR RI, masih ada *gap* kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebabnya, diduga perusahaan menganggap tingkat produktifitas tenaga kerja perempuan dinilai lebih rendah daripada laki-laki mengingat kaum perempuan mempunyai sifat-sifat alamiah melahirkan dan membesarkan anak serta mengurus keluarga. Hal ini ditengarai menjadi alasan perusahaan lebih memilih tenaga kerja laki-laki dalam memenuhi kebutuhan SDM perusahaan.

Untuk itu, Komisi VI DPR RI meminta KITB menjadi satu kawasan industri yang mampu memecahkan masalah tersebut. Sebab, tujuan keberadaan KITB bukan saja membangun fisik serta infrastruktur pendukungnya, melainkan bertujuan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi manusia yang ada disekelilingnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Komisi VI DPR RI mendapatkan penjelasan pihak pemerintah dan dari seluruh BUMN yang diundang saat kunjungan kerja Reses. Beberapa hal terkait kinerja perusahaan dapat terungkap seperti yang tersebut di bawah ini:

Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang Ngurah Wirawan memaparkan hal-hal sebagai berikut:



Latar Belakang



2018

- Isu Perang Dagang antara US – China
- Kenaikan tarif pajak bea impor di China

2019

- Pandemi Covid-19 bermula di Wuhan, China
- 33 Industri dari China melakukan relokasi, 23 diantaranya ke Vietnam.

2020

- 1000 industri AS ingin hengkang dari China
- Pemerintah mempersiapkan Kawasan Industri Terpadu Batang



Vietnam

Provinsi Quang Nam & Quang Ngai

Harga Lahan : USD 55/m²

Masa Sewa : 50 th

Industri Mayoritas :

- Otomotif
- Manufaktur
- Logam



Thailand

Chonburi & Rayong

Harga Lahan : USD 76/m²

Masa Sewa : 60 th

Industri Mayoritas :

- Logam
- Otomotif
- Infrastruktur

Kunjungan Presiden



30 Juni 2020
Kunjungan Perdana Presiden Joko Widodo dan meresmikan Grand Batang City



21 April 2021
Peninjauan perkembangan Kawasan beserta jajaran Menteri terkait dan Gubernur Jawa Tengah



8 Juni 2022
Presiden meresmikan Seremoni Tahap 2 Implementasi Industri Baterai Listrik Terintegrasi



3 Oktober 2022
Presiden meresmikan Groundbreaking Ceremony Wavin

Dukungan Pemerintah



PROYEK STRATEGIS NASIONAL
(Peraturan Presiden Nomor.109 2020)

5 Tahun
Free Period untuk sewa
jangka panjang

80 Tahun masa sewa
HGB di atas HPL



Konektivitas Terpadu
Kemudahan Akses Logistik

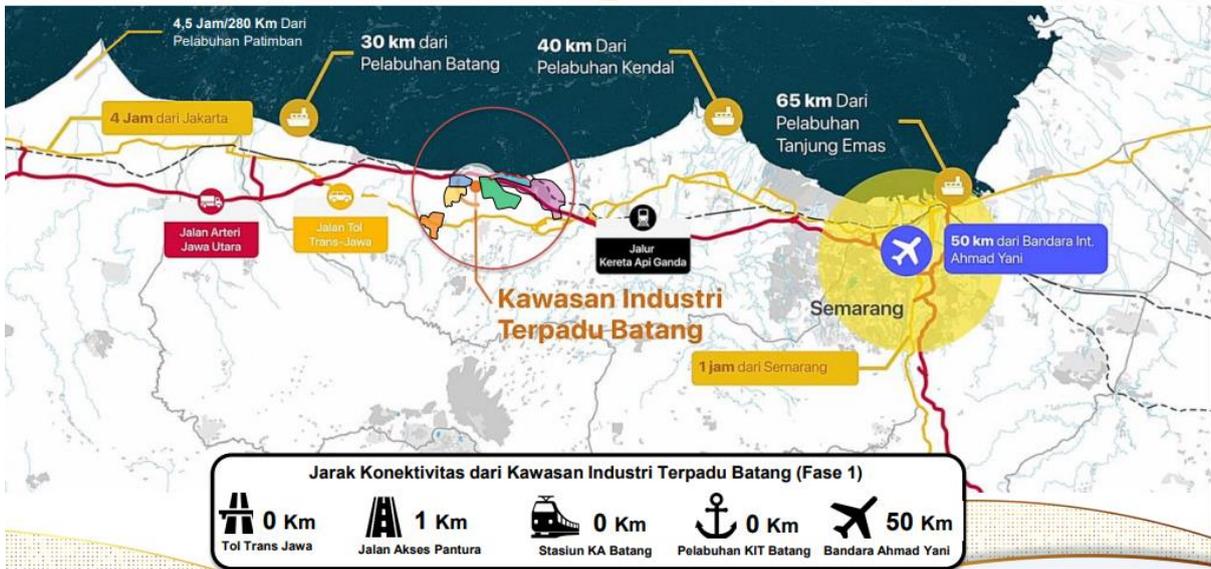
Dukungan Kementerian/Lembaga (Peraturan Presiden Nomor.106 2022)



Pemegang Saham



Multiakses



Master Plan



Video Progres



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Update Infrastruktur



Infrastruktur Sesuai Perpres



JENIS INFRASTRUKTUR	TARGET SELESAI		STATUS PEKERJAAN	KEBUTUHAN TENANT OPERASI		STATUS ASET
	PERPRES	FHO		SESUAI	TIDAK	
INVESTASI 2021						
1 Kegiatan Pembangunan di Klaster 1 Fase 1 (450 Ha)						
1 Jalan Kawasan						
a	Pembangunan Jalan KITB 4.27 km (Paket 1.1 A)	2021	Jun-22	Selesai	Sesuai	Perjanjian Serah Kelola
b	Pembangunan Jalan KITB 3.66 km (Paket 1.1 B)	2021	Jun-22	Selesai	Sesuai	Perjanjian Serah Kelola
c	Pembangunan Jalan KITB 7.85 km (Paket 1.2)	2021	Dec-22	Selesai	Sesuai	Perjanjian Serah Kelola
PERCEPATAN INVESTASI 2022-2024						
1 Kegiatan Pembangunan di Klaster 1 Fase 1 (450 Ha)						
1 Suplesi Air Baku dan Drainase Utama Kawasan Klaster 1 Fase 1						
a	Air Baku (Transmisi dan Reservoir)	Jul-22	Oct-23	Selesai	Sesuai	Belum serah terima
b	Bendung DAS Urang	Jul-22	Oct-23	Selesai	Sesuai	Belum serah terima
c	Drainase Utama Kawasan	Dec-22	Dec-22	Selesai	Sesuai	Belum serah terima
2 SPAM, SPAL dan Persampahan						
a	Sistem Penyediaan Air Minum	Feb-23	Feb-24	Masa Konstruksi	Sesuai	Belum serah terima
b	Sistem Pengelolaan Air Limbah	Dec-23	Dec-24	Masa Konstruksi	Sesuai	Belum serah terima
c	Sistem Pengelolaan Persampahan (Modul 1)	Dec-22	Dec-23	Selesai	Sesuai	Perjanjian Serah Kelola
3 Rumah Susun dan Fasilitasnya di Klaster 1 Fase 1						
a	Rusun Batang 1 sebanyak 4 Tower	Dec-22	Apr-23	Selesai	Sesuai	Perjanjian Serah Kelola
b	Rusun Batang 2 sebanyak 3 Tower	Dec-22	May-23	Selesai	Sesuai	Perjanjian Serah Kelola
c	Rusun Batang 3 sebanyak 3 Tower	Dec-22	Apr-23	Selesai	Sesuai	Perjanjian Serah Kelola
2 Kegiatan Pembangunan Pendukung Integrasi Antar Klaster						
1 Jalan Kawasan						
a	Pembangunan Jalan KITB 14.84 km (Paket 1.3)	Mar-22	Jun-23	Selesai	Sesuai	Perjanjian Serah Kelola
b	Pembangunan Jalan KITB 19.48 km (Paket 1.4)	Jan-22	Mar-22	Selesai	Sesuai	Perjanjian Serah Kelola

Infrastruktur Sesuai Perpres



INFRASTRUKTUR YANG SUDAH DIAKOMODIR DALAM PERPRES 106 TAHUN 2022 - BELUM TERLAKSANA

JENIS INFRASTRUKTUR	TARGET SELESAI		STATUS PEKERJAAN	KEBUTUHAN TENANT OPERASI		STATUS ASET
	PERPRES	FHO		SESUAI	TIDAK	
PERCEPATAN INVESTASI 2022-2024						
1 Kegiatan Pembangunan di Klaster 1 Fase 1 (450 Ha)						
1 SPAM, SPAL dan Persampahan						
a	Sistem Pengelolaan Persampahan (Modul 2, 3 dan 4)	Dec-22	TBI	Belum Terlaksana	Tidak	-
2 Kegiatan Pembangunan Pendukung Integrasi Antar Klaster						
1	Pematangan Lahan Klaster 1 Fase 2 seluas ± 400 Ha	Dec-23	Jun-24	On Progress	Tidak	-
2 Jalan Kawasan						
a	Pembangunan Jalan KITB 26.65 km (Paket 1.5)	Dec-24	TBI	Belum Terlaksana	Tidak	-
b	Pembangunan Jalan KITB 20.59 km (Paket 2)	Dec-24	TBI	Belum Terlaksana	Tidak	-

Infrastruktur Belum Sesuai Perpres

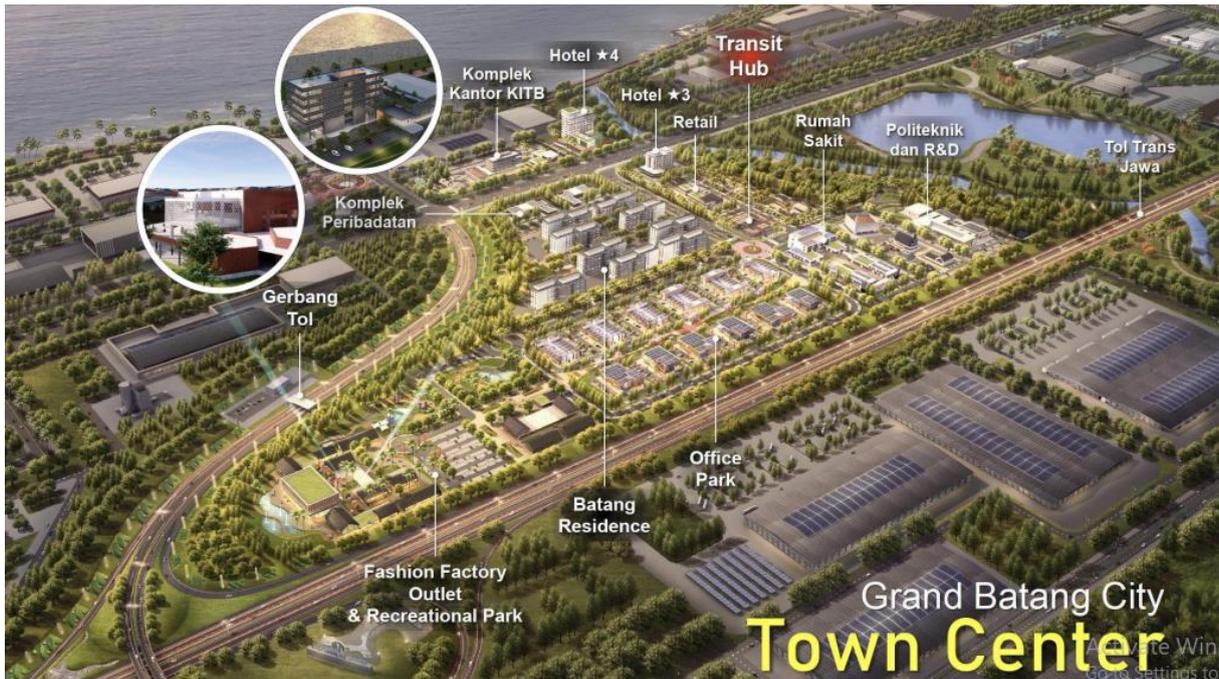


INFRASTRUKTUR YANG BELUM TERAKOMODIR DALAM PERPRES 106 TAHUN 2022

KEBUTUHAN PEMBANGUNAN		USULAN KONSTRUKSI	INSTANSI	STATUS	Keterangan
1 Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 - Infrastruktur Pendukung (400 Ha)					
a	Jaringan Distribusi Air Bersih Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (400 Ha)	2023-2024	INVESTASI KITB	Belum Terlaksana	Perlu dukungan CK
b	Jaringan Air Limbah Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (400 Ha)	2023-2024	INVESTASI KITB	Belum Terlaksana	Perlu dukungan CK
2 Klaster 1 Fase 2 - Infrastruktur Pendukung (2.650 Ha)					
a	Pematangan Lahan Klaster 1 Fase 2 Tahap 2 (600 Ha)	2023-2024	INVESTASI KITB	Belum Terlaksana	Perlu dukungan BM / KITB akan mencari dukungan Pendanaan Komersial
b	Pematangan Lahan Klaster 1 Fase 2 Tahap 3 (150 Ha)	2025-2026	INVESTASI KITB	Belum Terlaksana	Perlu dukungan BM / KITB akan mencari dukungan Pendanaan Komersial
c	Pematangan Lahan Klaster 1 Fase 2 Tahap 4 (360 Ha)	2026-2027	INVESTASI KITB	Belum Terlaksana	Perlu dukungan BM / KITB akan mencari dukungan Pendanaan Komersial
d	Sumber Air Baku (Bendungan) dan Jaringan Transmisi	2023-2027	APBN PUPR-SDA	Belum Terlaksana	Perlu dukungan SDA
e	Reservoir Air Baku	2023-2027	APBN PUPR-SDA	Belum Terlaksana	Perlu dukungan SDA
f	IPA dan Jaringan Distribusi Klaster 1 Fase 2	2025-2027	INVESTASI KITB	Belum Terlaksana	Perlu dukungan CK
g	IPAL dan Jaringan Pipa Klaster 1 Fase 2	2025-2027	INVESTASI KITB	Belum Terlaksana	Perlu dukungan CK
h	TPST Klaster 1 Fase 2	2025-2027	APBN PUPR-CK	Belum Terlaksana	Perlu dukungan SDA
i	Drainase Utama Kawasan (Normalisasi Sungai)	2024-2025	APBN PUPR-SDA	Belum Terlaksana	Perlu dukungan SDA
j	Rusunawa 2 Lokasi	2025-2027	APBN PUPR-Perumahan	Belum Terlaksana	Perlu dukungan Perumahan

Progres Infrastruktur BUMN Pendukung





Marketing Update Tenant Fase 1



Marketing Update Fase 2 – Hot Prospect

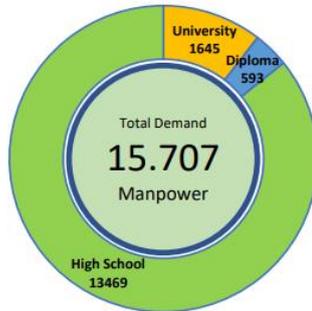


Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Fase 1



No	Tenant	Jenis Industri	Luas Lahan (Ha)	Nilai Investasi (USD)	Asal negara	Estimasi Penyerapan Tenaga Kerja
1	PT.KCC Glass Indonesia	Kaca	46	110	Korea Selatan	625
2	PT.Rumah Keramik Indonesia	Keramik	13,8	60	Indonesia	400
3	PT.Cosmos Indo Ink	Tinta	1,4	20	Korea Selatan	150
4	PT.Tawada Helathcare Group Company	Alat Kesehatan	1,9	20	Indonesia	100
5	PT Yih Quan Footwear Indonesia	Sepatu	16,2	75	Taiwan	13.200
6	PT Jayamas Medica Industri (Onemed)	Alat Kesehatan	4,1	15	Indonesia	100
7	PT Unipack Plasindo	PVC	2,9	15	Indonesia	150
8	PT Window Shutter Indonesia	Furniture	2,1	10	Indonesia	100
9	PT Acindo Medika	Alat Kesehatan	2,7	12	Indonesia	120
10	PT Aneka Gas Industri Tbk	Gas Industri	2,8	18	Indonesia	100
11	PT.Wavin Manufacturing Indonesia	Pipa	20	100	Belanda	562
12	PT.Interskala Medika Indonesia	Alat Kesehatan	1,3	15	Indonesia	100
13	LG Energy Consortium	Battery EV	67	TBI	Korea Selatan	TBI
			183,32	470 USD (IDR 7,1T)		15.707

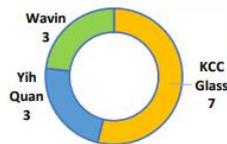
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja



Kebutuhan Tertinggi

PT. Yih Quan Footwear Indonesia	13.200 Naker
PT. KCC Glass Indonesia	625 Naker
PT. Wavin Manufacturing Indonesia	562 Naker

Tenaga Kerja Asing



KCC Glass Indonesia	7 orang
Yih Quan Footwear Indonesia	3 orang
Wavin Manufacturing Indonesia	3 orang

Activate Win
Go to Settings

Persyaratan Tenaga Kerja



KITB memiliki perjanjian tentang ketenagakerjaan yang harus dipatuhi kepada investor sejak awal penandatanganan PPTI yaitu di pasal 25 mengenai penyerapan Tenaga kerja dari lokal minimal 30%

PASAL 25 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki tanggung jawab untuk melakukan usaha maksimal sehubungan dengan penyerapan **tenaga kerja** dari lingkungan sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi dari **PIHAK KEDUA** minimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh **tenaga kerja** **PIHAK KEDUA** atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Activate Win
Go to Settings

Koordinasi Dengan Kawasan Industri Sekitar



Kunjungan Himpunan Kawasan Industri (HKI) ke KITB dalam rangka benchmark & koordinasi



Kunjungan KITB beserta rombongan HKI ke Jawa Timur (JIPE)



Kunjungan KITB beserta rombongan HKI ke Jawa Timur (SIER)

"KITB telah bergabung di Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sejak tahun 2021 dan sudah berkoordinasi dengan Kawasan Industri di Pusat dan Daerah"

Activate Win
Go to Settings to

Kegiatan KITB dengan Masyarakat Sekitar



"Perayaan Hari Ulang Tahun PT Kawasan Industri Terpadu Batang Ke-2 bersama masyarakat sekitar dari Kabupaten Batang, Kendal dan Pekalongan serta Semarang. Kegiatan ini mempertemukan UMKM Batang dengan Tenant Internasional KITB dalam rangka memperkenalkan produk lokal Batang"

Activate Win
Go to Settings to

Koordinasi Dengan Forkopimda dan Forkopimcam



Koordinasi dengan Forkopimda
Kab. Batang



Koordinasi dengan Forkopimcam 3 Kecamatan
penyangga KITB, Kecamatan Gringsing,
Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Subah

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Koordinasi Dengan Masyarakat Sekitar



Koordinasi dengan 4 Desa penyangga KITB, Desa Kedawung,
Desa Ketanggan, Desa Plelen dan Desa Sawangan



Kegiatan sosial dengan 4 Desa Penyangga dan
Koordinasi dengan Awak Media Lokal

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Program Unggulan TJSL KITB

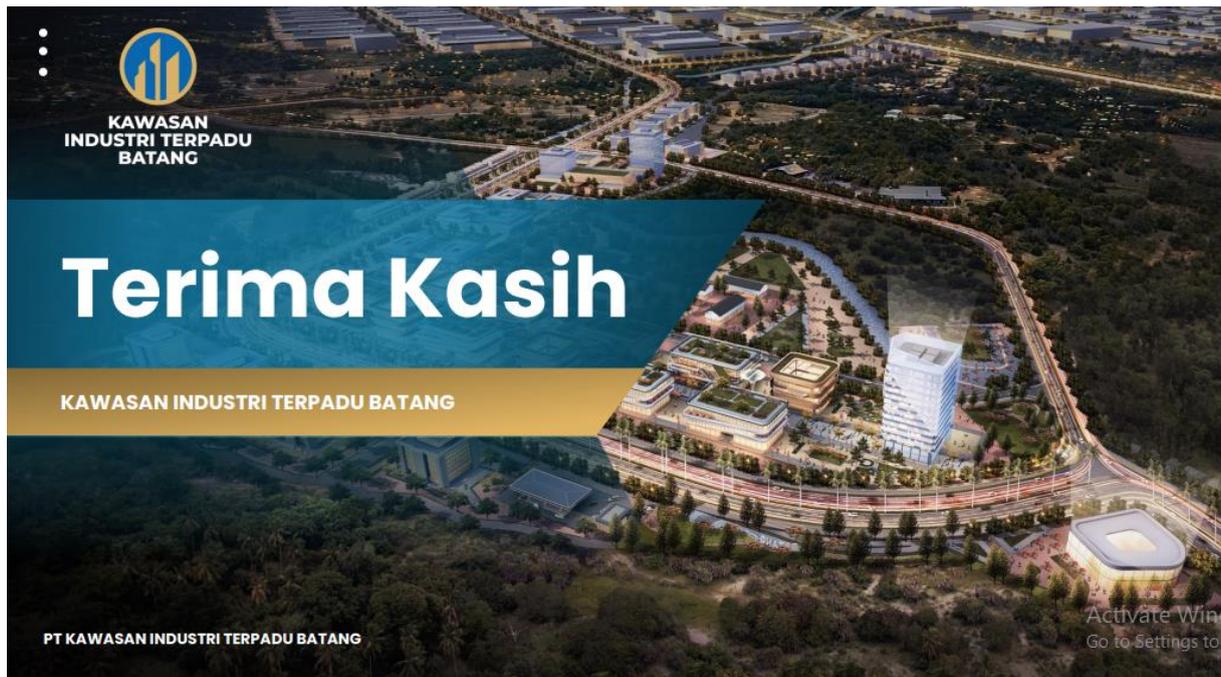


No	Nama Inisiatif CSR/ TJSL	Kategori/ Bidang	Deskripsi	Dokumentasi
1	FGD Ketenagakerjaan Bersama Kantor Staf Presiden	Ketenaga kerjaan	Rapat kolaborasi ini menghasilkan Maklumat Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang penyediaan tenaga kerja di KITB salah satunya mengintegrasikan aplikasi pencari kerja milik Pemda dan Kementerian	
2	Penanaman 1000 bibit Pohon di Area RTH KITB	Lingkungan	Penanaman 1000 Pohon ini dapat menjaga produksi oksigen dan mendukung konsep ramah terhadap lingkungan (Eco Green) di Indonesia	
3	Perbaikan dan penambalan jalan Akses Kedawang-Banyuputih	Sosial	Perbaikan Akses Jalan Kedawang-Banyuputih ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat mempercepat arus transportasi sehingga lebih efisien	

Program Unggulan TJSL KITB



No	Nama Inisiatif CSR/ TJSL	Kategori/ Bidang	Deskripsi	Dokumentasi
4	Bright Future Ahead	Pendidikan	Siswa/Siswi SMK Batang mengetahui terlebih dahulu kriteria tenant KITB sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja lokal yang profesional.	
5	Batang Product Goes Around The World	Ekonomi	Tenant KITB nantinya dapat bekerjasama dengan UMKM Batang sehingga UMKM Batang dapat dikenal di Tenant Internasional KITB	
6	Pelatihan Tenaga Keamanan dan Sertifikasi Gada Pratama	Pendidikan dan Sosial	Masyarakat Desa Penyanggah di sekitar Kawasan mendapatkan prioritas untuk dapat bekerja di tenant KITB dengan pelatihan dan sertifikasi	
7	Pengembangan Potensi Wisata Pantai Dukuh	Sosial	Pantai Dukuh Desa Ketanggan dapat menjadi destinasi wisata di sekitar Kawasan yang berada di garis pantai, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar	



Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan memberikan paparan sebagai berikut:



1 Realisasi Investasi di Kab. Batang Tahun 2022 dan 2023 (Q1)

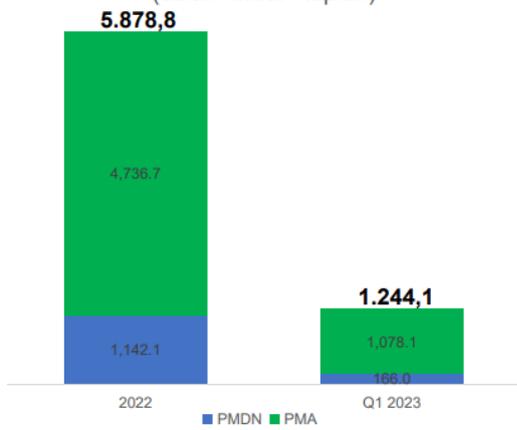


KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

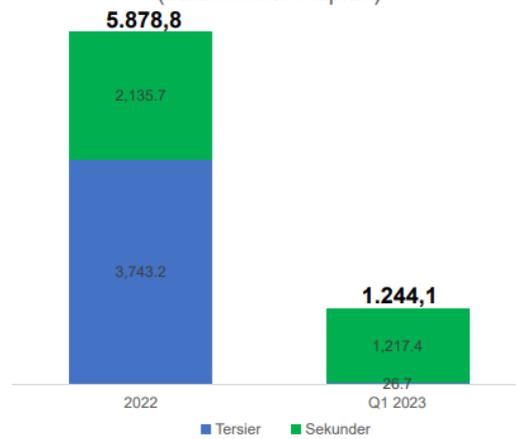
Realisasi PMA di Kab. Batang 2022 dan Q1 2023



Investasi di Kab. Batang berdasarkan Jenis Penanaman Modal (dalam Miliar Rupiah)



Investasi di Kab. Batang Berdasarkan Sektor Penanaman Modal (dalam Miliar Rupiah)



Activate Windows

Realisasi PMA di Kab. Batang Berdasarkan Negara 2022 dan Q1 2023 (dalam USD Juta)

2022			Q1 2023			Total (2022 dan Q1 2023)		
No.	Negara	Nilai Investasi	No.	Negara	Nilai Investasi	No.	Negara	Nilai Investasi
1.	Jepang	211,7	1.	Korea Selatan	24,7	1.	Jepang	213,4
2.	Swiss	64,0	2.	Hong Kong	19,8	2.	Swiss	76,4
3.	Korea Selatan	47,9	3.	Swiss	12,5	3.	Korea Selatan	72,6
4.	Tiongkok	3,6	4.	Samoa Barat	12,3	4.	Hong Kong	20,2
5.	Singapura	2,5	5.	Jepang	1,7	5.	Samoa Barat	12,3
6.	Hong Kong	0,4	6.	Singapura	1,1	6.	Tiongkok	4,4
	Total	330,1	7.	Tiongkok	0,9	7.	Singapura	3,6
			Total	72,8	Total	402,9		

Activate
Go to Setting

Top-10 Realisasi PMDA dan PMDN di Kab. Batang Berdasarkan Sektor 2022 dan Q1 2023 (dalam Rp. Miliar)

2022			Q1 2023			Total (2022 dan Q1 2023)		
No.	Sektor	Nilai Inv.	No.	Sektor	Nilai Inv.	No.	Sektor	Nilai Inv.
1.	Listrik, gas, dan air	3.035,1	1.	Ind. Mineral non logam	478,4	1.	Listrik, gas, dan air	3.059,7
2.	Ind. Makanan	924,4	2.	Ind. Logam	268,8	2.	Ind. Makanan	1.116,5
3.	Perumahan, KI & kantor	642,4	3.	Ind. Makanan	192,2	3.	Ind. Mineral non logam	1.075,6
4.	Ind. Mineral non logam	597,3	4.	Ind. Kulit dan alas kaki	181,7	4.	Perumahan, KI & kantor	642,7
5.	Ind. Tekstil	477,2	5.	Ind. Tekstil	50,8	5.	Ind. Tekstil	528,0
6.	Jasa lainnya	58,6	6.	Listrik, gas, dan air	24,6	6.	Ind. Logam	310,6
7.	Ind. Kayu	54,4	7.	Ind. Lainnya	24,3	7.	Ind. Kulit dan alas kaki	181,7
8.	Ind. Logam dasar	42,0	8.	Ind. Kayu	14,0	8.	Ind. Kayu	68,4
9.	Ind. Kimia dan farmasi	19,8	9.	Ind. Kimia dan farmasi	7,3	9.	Jasa lainnya	58,8
10.	Ind. Lainnya	12,7	10.	Hotel dan restoran	1,0	10.	Ind. Lainnya	37,0
	Lainnya	15,0		Lainnya	1,2		Lainnya	43,9
	Total	5.878,8	Total	1.244,1	Total	7.122,9		

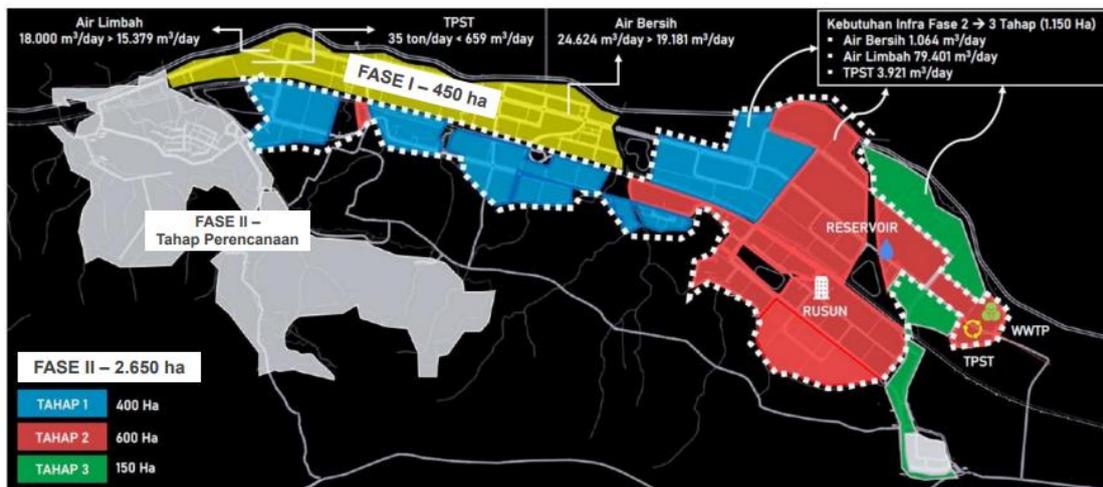
Activate
Go to Setting

2 Progres Pembangunan dan Perkembangan Investasi di KIT Batang Fase I



Pengembangan KIT Batang (3.100 ha) dibagi menjadi 2 fase

Fase I seluas 450 ha dan fase II seluas 2.650 ha (dalam 3 tahap)



Sumber: Kemenko Perekonomian, 2023.

Progres Pengembangan Fase I (450 ha)

Mayoritas infrastruktur sudah selesai, perlu percepatan serah terima dan penyediaan SDM pengelola aset.

Kavling industri Fase 1 (450 Ha) sudah terjual habis.

Infrastruktur Fase 1 sudah cukup memadai, secara umum sudah siap operasi menjelang akhir 2023.



Sumber: Kemenko Perekonomian, 2023.

Perkembangan Investasi Klaster I Fase I

13 investor telah konfirmasi untuk membangun fasilitas produksi senilai Rp. 7,1 Triliun

No.	Tenant	Jenis Industri	Luas Lahan (Ha)	Asal Negara	Estimasi Investasi (Juta USD)	Estimasi Penyerapan Tenaga Kerja
1.	PT. KCC Glass Indonesia	Kaca	46	Korea Selatan	110	500
2.	PT. Rumah Keramik Indonesia	Keramik	13,8	Indonesia	60	300
3.	PT. Cosmos Indo Ink	Tinta	1,4	Korea Selatan	20	150
4.	PT. Tawada Healthcare Group Comp.	Alat Kesehatan	1,9	Indonesia	20	100
5.	PT. Yih Quan Footwear Indonesia	Sepatu	16,2	Taiwan	75	16.000
6.	PT. Jayamas Medica Industri (Onemed)	Alat Kesehatan	4,1	Indonesia	15	100
7.	PT. Unipack Plasindo	PVC	2,9	Indonesia	15	150
8.	PT. Window Shutter Indonesia	Furniture	2,1	Indonesia	10	100
9.	PT. Acindo Medika	Alat Kesehatan	2,7	Indonesia	12	120
10.	PT. Aneka Gas Industri Tbk	Gas Industri	2,8	Indonesia	18	100
11.	PT. Wavin Manufacturing Indonesia	Pipa	20	Belanda	100	750
12.	PT. Interskala Medika Indonesia	Alat kesehatan	1,3	Indonesia	15	100
13.	LG Consortium (dalam proses)	Baterai EV	67	Indonesia	tbc	tbc
Total			182,2		470 (IDR 7,1 T)	18.470

3 Contoh Fasilitas Perkembangan Rencana Investasi KCC Glass



Timeline Investai KCC Glass di Indonesia

Investasi KCC Glass akan mengalami keterlambatan jika pembangunan Jetty belum selesai tepat waktu



- Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanaman Modal Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah, pembangunan Jetty/Trestle/Wharf **dijadwalkan selesai pada Desember 2023**.
- Update dari Kementerian Perhubungan, pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk Jetty, dijadwalkan mulai dibangun pada 2022 hingga 2024.

Activate \n Go to Sett

4 Kebutuhan Percepatan Fase II Pengembangan KIT Batang



Activate V
Go to Setting



Potensial Tenant Kluster I Fase II

20 investor menyampaikan komitmen untuk pembangunan Kluster I Fase II seluas 961 Ha



No.	Tenant	Jenis Industri	Luas Lahan (Ha)	Asal Negara
1.	PT. MBM	Industri baterai	200	Indonesia
2.	PT. Refined Bangka Tin	Industri produk hilir timah	10	Indonesia
3.	PT. Jawa Surya	Corrugated Carton Box	4	Indonesia
4.	VKTR	Industri otomotif	75	Indonesia
5.	Air Liquide	Industri gas	1	Perancis
6.	Tokai	Industri gas	8	Amerika
7.	Hailiang Co	Copper foil plant	10	Tiongkok
8.	PT. Maharaksa Biru Energy Tbk	Manufaktur bio propylene glycol	4	Indonesia
9.	CNGR	Nikel refinery	60	Tiongkok
10.	Foxconn	Industri baterai dan kendaraan listrik	12	Taiwan
11.	PT. Gemilang Mitra Sejahtera	Manufaktur keramik	12	Indonesia
12.	PT. Opsico Trada Nusantara	Industri gas/LNG	10	Indonesia
13.	PT. Panca Karya	Furniture laboratorium	3	Indonesia
14.	Pupuk Kujang	Industri pupuk	40	Indonesia
15.	Flatt Glass Group	Industri kaca dan turunannya	160	Tiongkok
16.	CATL	Industri baterai	100	Tiongkok
17.	LG Consortium	Industri baterai	192	Korea Selatan
18.	Unipack Plasindo	Produksi pipa	10	Indonesia
19.	Tynergy	Industri baterai listrik	20	Indonesia
20.	SEG Solar*	Produksi solar panel	30	Amerika Serikat
Total			961	

Total Industrial Leads:

220
Companies

Total Filtered LOI:

19
Companies

SEG menandatangani MoU dengan KIT Batang untuk penggunaan lahan pada tanggal 20 April 2023

Total Area of Demand by LOI:

931
Ha

Activate



No.	Isu	Later Belakang	Timeline	Progres as of 28 Maret 2023	Dukungan yang diharapkan	PIC
1.	Pematangan Lahan dan Infrastruktur Dasar Fase 2 (2.650 Ha)	<p>1. Pengembangan Kawasan Fase 2 telah LOI dengan Tenan seluas 741 Ha terdiri dari 16 calon tenant (diluar LG Tahap 1 seluas 122 Ha)</p> <p>2. Keberlanjutan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang</p>	<p>Tahap 1 400 Ha (2023)</p> <p>Tahap 2 600 Ha (2023/2024)</p>	<p>1. PT KITB telah mengajukan RAB dan DED seluas 400 Ha kepada Kemen PUPR melalui Dirjen Bina Marga.</p> <p>2. PUPR sedang proses lelang per Maret 2023 dan proses konstruksi direncanakan pada bulan Mei s.d. Desember 2023</p> <p>4. Gardu Induk KITB mulai konstruksi di Januari 2023 oleh PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah yang berlokasi di Pematangan Lahan Tahap 1 seluas 400 Ha.</p>	<p>Pendanaan Pematangan Lahan Tahap 1 : 600 Ha Dukungan Dana APBN / KITB mengusulkan dapat didanai dengan pinjaman komersial</p>	<p>Kemenkeu, K.PUPR, K.BUMN</p>

Activate V
Go to Setting

Sumber: Kemenko Perekonomian, KITB

14



Komitmen Global Reduksi Emisi Perbandingan Komitmen Reduksi Emisi Nasional Anggota ASEAN



Lima (5) negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Vietnam telah berkomitmen untuk menghapus batubara sebagai bahan bakar dalam komitmen transisi energi batubara ke energi bersih *United Nations Climate Change Conference of Parties (COP26)*.

Lima (5) negara ASEAN ini menyumbang sekitar 76% dari total kapasitas terpasang batubara ASEAN di tahun 2020.

Keterangan:

1. Target NDC Indonesia dinaikkan jadi 31,8% "tanpa syarat" (dengan usaha sendiri) & 43,2% "bersyarat" (dengan dukungan internasional yang memadai).
2. Pengurangan emisi gas rumah kaca di setiap negara ASEAN (kasus business as usual), kecuali Singapura dan Malaysia
3. "Unconditional/tanpa syarat" mengacu pada target implementasi yang ditetapkan oleh negara berdasarkan sumber daya dan kemampuan mereka sendiri, sementara "conditional/bersyarat" mengacu pada target yang akan dilakukan negara jika sarana dukungan internasional disediakan. Target "conditional" lebih tinggi dari target "Unconditional".

Sumber: the 7th ASEAN Energy Outlook 2020-2050, 2023.

Respon Dunia Usaha Global Terhadap Reduksi Emisi (1/2)

217 perusahaan multinasional berkomitmen mencapai *net-zero carbon 2040*



3 strategi mencapai target emisi *net-zero carbon 2040*:

- Eliminasi karbon**
Strategi dekarbonisasi melalui perubahan dan inovasi bisnis.
- Pelaporan berkala**
Mengukur dan melaporkan emisi gas rumah kaca secara berkala.
- Credible offsets**
Menetralkan emisi dengan menggantinya dengan penyeimbang (*offset*).

349 perusahaan top global menargetkan pengurangan emisi karbon

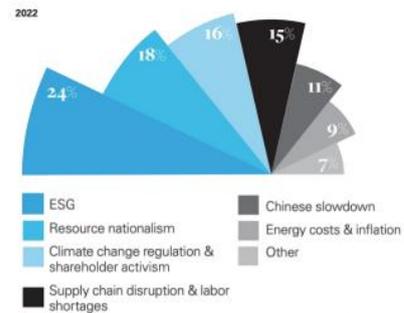
Pertumbuhan 2019 vs 2021
Partisipasi perusahaan: 163 ► 349
Kontribusi energi terbarukan: 41% ► 45%

Jenis target iklim:

- Carbon Neutral**
Dicapai ketika perusahaan sepenuhnya mengimbangi emisi gas rumah kacanya.
- Renewable 100% (RE100)**
Dicapai ketika perusahaan mengandalkan 100% energi terbarukan.
- Science-Based Target (SBT)**
Penurunan emisi sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius.

Pemintaan produk berkelanjutan meluas hingga pertambangan dan industri hilir

Survei: Isu lingkungan, sosial, dan tatakelola (ESG) menjadi perhatian utama industri tambang dan logam, baik bagi pebisnis, investor, maupun regulator.



Sumber: RE100 2021 Annual Disclosure Report

Sumber: White & Case 2022, Mining Metals Market Sentiment Survey

Respon Dunia Usaha Global Terhadap Reduksi Emisi (2/2)

50 Perusahaan Top Dunia Targetkan Pengurangan Emisi Karbon

Pada tahun 2019, 500 perusahaan terbesar di dunia dengan tenaga kerja +/-70 juta orang dan menghasilkan pendapatan hingga USD 33 triliun telah membuat komitmen untuk mengurangi jejak karbon mereka.

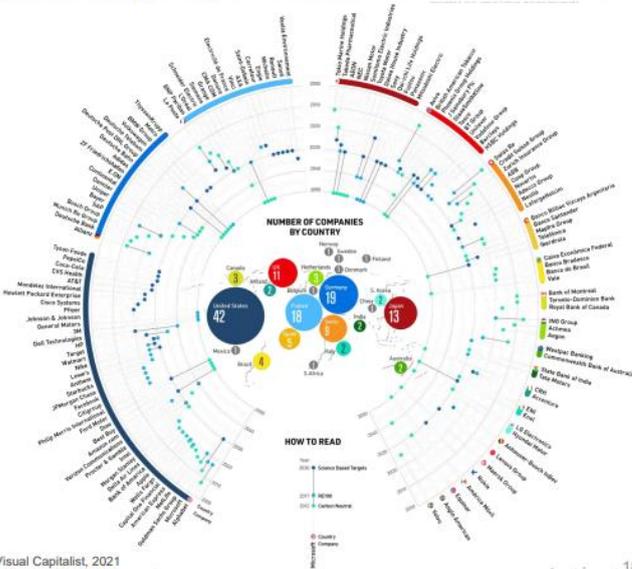
500 perusahaan Fortune Global dengan target iklim global?

163

Negara yang direpresentasikan

23

- JENIS TARGET IKLIM**
- Karbon Netral¹**
dicapai ketika sebuah perusahaan sepenuhnya mengimbangi emisi gas rumah kacanya.
 - 100% Terbarukan (RE100)**
dicapai ketika sebuah perusahaan bergantung 100% kepada energi baru terbarukan.
 - Target Berbasis Sains (SBT)**
Emisi berkurang sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat celsius



¹Termasuk komitmen untuk mencapai "net zero emissions"
²Perusahaan yang tidak spesifik menyebutkan tanggal tidak dimasukkan ke dalam grafik

Sumber: Visual Capitalist, 2021

Activate 18

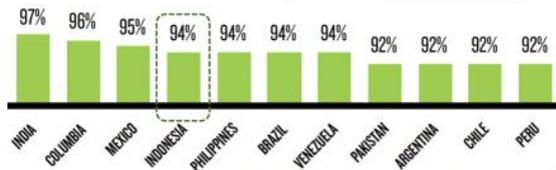
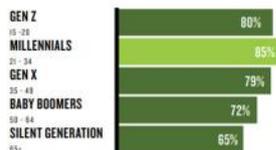
Respon Market Terhadap Reduksi Emisi (1/2)

Nielsen's Report 2018: Permintaan besar produk berkelanjutan di seluruh dunia

Konsumen makin mementingkan dan menginginkan produk berkelanjutan.

Persentase responden yang mengatakan program perusahaan untuk peningkatan lingkungan sangat penting:

Lintas Gender
Lintas Generasi
Lintas Negara



Sumber: Nielsen global-sustainable-shoppers-report-2018

Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) di Uni Eropa

Apa itu CBAM

Pengenaan biaya tambahan untuk produk yang akan diekspor ke Uni Eropa (UE) yang tergolong tidak ramah lingkungan.

Lingkup

CBAM akan diterapkan bertahap terhadap sejumlah barang yang menggunakan energi tinggi dalam proses produksinya:



Sistem pelaporan akan berlaku mulai tahun 2023 untuk produk-produk tersebut. Importir akan mulai membayar biaya tambahan mulai tahun 2026.

Penerapan di luar UE

- California, AS (untuk impor energi listrik tertentu).
- Kanada dan Jepang (tahap inisiasi).

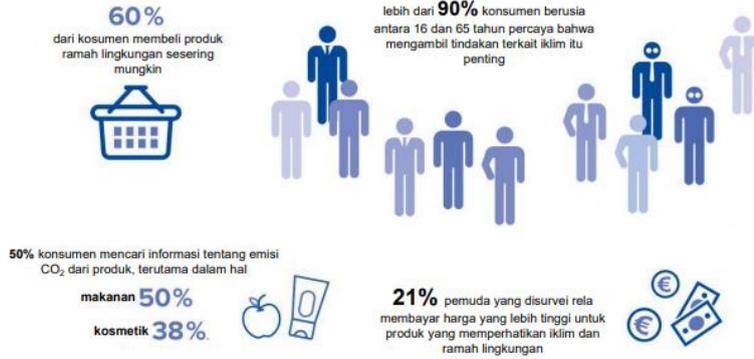
Sumber: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism, European Commission, 2021

19

Climate Awareness Report 2021:

Permintaan yang Semakin Meningkatkan untuk Produk yang Mengurangi Emisi Karbon

- Climatepartner mensurvei lebih dari seribu konsumen antara usia 16 dan 65 tahun di Eropa tengah tentang sikap mereka terhadap program perusahaan terkait perubahan iklim.
- Menurut survei, keinginan perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim sangat mempengaruhi keputusan dalam melakukan...



Sumber: Climate Awareness Report dari Climate Partner, 2021

Activat

Respon Lembaga Pembiayaan Terhadap Reduksi Emisi

Hampir 200 lembaga keuangan telah berkomitmen untuk tidak membiayai proyek terkait batubara

- **Bank Dunia** mengumumkan pembatasan pertama: Tidak ada pembiayaan proyek baru kecuali dalam 'kondisi tertentu/rare circumstances'
- **2 Bank Pembangunan Multilateral dan 9 Lembaga Pembiayaan Pembangunan** mengikuti Bank Dunia yang membatasi pembiayaan proyek terkait 'batu bara'
- **Asian Infrastructure Investment Bank** mengusulkan pembatasan batubara
- **AXA** menjadi perusahaan asuransi global pertama yang membatasi penjaminan proyek dan asuransi untuk proyek baru terkait batubara
- **ING** menjadi bank global pertama yang menetapkan tanggal penghentian penggunaan batubara di sektor listrik pada tahun 2025.



- **Norwegian Sovereign Wealth Fund** akan melakukan divestasi terhadap perusahaan yang menghasilkan 30% pendapatan dari kegiatan yang terkait dengan batu bara
- Pembatasan batubara bank swasta pertama diumumkan oleh **Bank of America**
- **Pengaturan Kredit Ekspor**, pembatasan batubara mencakup 35 Lembaga Kredit Ekspor
- **International Finance Corporation** menutup celah pembiayaan: 95% pinjaman "dibatasi" untuk menghindari batu bara dan mempromosikan energi bersih
- **Standard Chartered** mengumumkan berakhirnya investasi pembangkit batubara baru
- **Royal Bank of Scotland**, pembatasan batubara ditingkatkan dengan memperketat pinjaman umum kepada perusahaan yang terlibat dalam batubara

Tindakan yang dilakukan untuk mencapai target bauran energi 23% EBT tahun 2025. Proyek signature EBT juga telah dibangun di Indonesia bekerja sama dengan investor asing.

1. **Konstruksi on-grid Pembangkit listrik berbasis EBT (berdasarkan Rencana PLN 2021-2030)**, termasuk Solar terapung (Target kapasitas instalasi pembangkit listrik EBT di tahun 2025: 18,5 GW)
2. **Implementasi PLTS Atap** (Target 2025: 3.610 MW)
3. **Konversi Diesel ke Pelambngkit Listrik EBT (atau Gas sebagai transisi)** (Target 2025: 499 MW)
4. **Mandatori B30** (Target 2025: 11,6 juta kL)
5. **Co-Firing Biomassa di PLTU Batubara** (Target 2025: 10,2 juta ton)
6. **Penyediaan Akses Energi Modern dengan EBT** (skala kecil seperti Mini-Hydro, Solar) (Target 2025: 1,36 MW)
7. **Eksplorasi Panas Bumi oleh Pemerintah** (Target 2025: 9 area panas bumi dengan potensi pengembangan 295 MW)
8. **Implementasi Off Grid EBT dan Pemanfaatan langsung** (Target 2025: 100% EBT dan 100% RDB – Biogas 30.043 ribu m³)

Program pendukung:

9. **Pensiun dini PLTU** (Target: tidak ada konstruksi PLTU baru di 2026)
10. **Improvement of Electricity Infrastructure** (Smart Grid)
11. **Elektrifikasi kendaraan & peralatan rumah tangga** (kompor) (Target 2025: 400ribu mobil; 1,7 juta motor; kompor induksi bagi 8,2 jt rumah tangga)
12. **Pajak karbon dan perdagangan karbon** (Target 2025: implementasi perdagangan karbon secara menyeluruh)



1. **PLTS Terapung Cirata (145 MW)** dengan nilai investasi US\$18,8 miliar, operator: Pembangkitan Jawa-Bali Masdar Solar Energy (UAE).
2. **Pembangkit listrik tenaga angin Sidrap (75 MW)** dengan nilai investasi US\$150 juta, operator: UPC Sidrap Bayu Energi (US).
3. **PLTS Likupang (21 MW peak)** dengan nilai investasi US\$29.2 juta, operator: Vena Energy (Singapore).

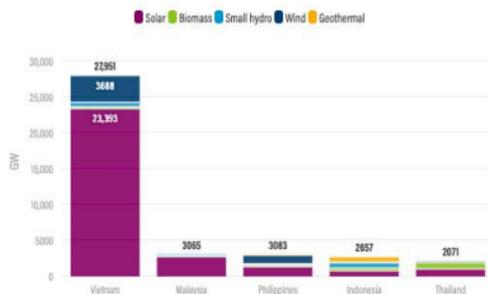
Sumber: Dewan Energi Nasional Indonesia, 2022. Perusahaan Listrik Negara (PLN), 2021.

22

Lesson Learned dari Vietnam:

Penghentian pengembangan bahan bakar fosil merupakan hal yang penting untuk mencapai target Net Zero Emission

Prakiraan kapasitas tambahan EBT kumulatif di beberapa negara Asia Tenggara terpilih 2020-23



Sumber: WRI Indonesia, 2022.

- Investasi di sektor EBT Vietnam meningkat 89% (tertinggi ketiga) ditengah keterpurukan investasi global;
- Di tahun 2023, kapasitas EBT Vietnam diproyeksikan hampir 3 kali lipat dari gabungan 4 negara pasar utama EBT di ASEAN.
- Di Vietnam, kapasitas atap panel surya tumbuh 25 kali lipat dalam setahun dari 0,38GW (2019) menjadi 9,3GW (2020) karena melonjaknya permintaan komersil dan industri akibat insentif pemerintah dalam waktu terbatas yang berakhir pada 2020.
- Kendati pasokan energi bersih lebih besar dibanding jumlah jaringan yang ada, Vietnam harus tetap membangun PLTU untuk beberapa dekade ke depan karena tingginya kebutuhan. Tanpa adanya insentif EBT dan peningkatan kualitas, maka akan terjadi perlambatan pencapaian target *net-zero emission* pada tahun 2050.
- Beberapa hal yang sedang dan perlu dilakukan oleh Pemerintah Vietnam:
 - a. Memungkinkan transaksi *direct off-site* antara konsumen industri dan pembangkit energi terbarukan yang memungkinkan penjualan energi bersih dalam volume lebih tinggi, khususnya untuk sektor tekstil yang masih banyak menggunakan bahan bakar fosil.
 - b. penghentian pengembangan bahan bakar fosil



Terima Kasih

Kementerian Investasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44,
Jakarta 12190 – Indonesia
T: +62 21 525 2008
F: +62 21 525 4945
E: info@bkpm.go.id
Bkpm.go.id
investindonesia.go.id



Activate V
Go to Setting

3. REKOMENDASI

Beberapa pokok pikiran yang diambil dari pendalaman kunjungan kerja Reses Komisi VI DPR RI terkait progress pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang dan progress PLTG Tambak Lorok serta kinerja dari BUMN Kawasan Industri

Wijayakusuma (KIW), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Indonesia Power dan PT Phapros Tbk dan hal-hal penting lainnya terkait dengan perkembangan perseroan. disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam paparannya di depan Tim Kunres Komisi VI DPR RI PT Kawasan Industri Terpadu Batang menyatakan bahwa dasar hukum pembangunan Kawasan Industri tersebut adalah Peraturan Presiden No.106 Tahun 2022 yang tujuannya disebutkan dalam butir a *Menimbang*

“bahwa dalam rangka percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, perlu melakukan upaya percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah yang ramah lingkungan, modern, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan”

2) Dinyatakan dalam Pasal 23 Perpres 106/2022 tersebut, Pendanaan dalam rangka pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa penyertaan modal negara, penjaminan pemerintah, dan/atau belanja di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. penerbitan obligasi oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan patungan;
- d. pinjaman konsorsium Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral;
- e. penerbitan saham publik/ initial public offering dan dana investasi real estat oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan patungan; dan/atau
- f. pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- 3) Disampaikan oleh PT KITB bahwa latar belakang terbitnya Perpres tersebut adalah:
 - a. Isu Perang Dagang antara US – China dan Kenaikan tarif pajak bea impor di China;
 - b. Pandemi Covid-19 bermula di Wuhan, China dimana 33 Industri dari China melakukan relokasi, 23 diantaranya ke Vietnam;
 - c. 1000 industri AS ingin hengkang dari China.

- 4) Dalam Pasal 24 Perpres 106/2022 tersebut dinyatakan, untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan, Pemerintah menugaskan konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari:
 - a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk;
 - b. PT Kawasan Industri Wijayakusuma; dan
 - c. PT Perkebunan Nusantara IX,

- 5) Komisi VI DPR RI mendapat masukan bahwa Kawasan Industri Terpadu Batang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Perpres No.109/2020

Selanjutnya, berdasarkan diskusi dan pendalaman Kunres Komisi VI DPR RI beberapa hal terungkap antara lain:

1. Progress pembangunan Fase I Kawasan Industri Terpadu Batang sesuai yang diamanatkan dalam Perpres 106/2022 dinilai cukup berhasil
2. Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud Perpres 106/2022 dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi;
..perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, perusahaan terafiliasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, dan badan usaha lain sesuai dengan kaidah bisnis dan tata Kelola perusahaan yang baik..

Maka kinerja dari BUMN Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Indonesia Power dalam upaya melaksanakan tugas pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang dapat dinilai cukup berhasil.

3. Dalam Kunjungan Kerja Reses ke Semarang tersebut, Komisi VI DPR RI juga berkesempatan mendengarkan secara langsung paparan kinerja perusahaan PT Phapros Tbk, perusahaan farmasi yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Kimia Farma Tbk (saham sebesar 56,7%) dan sisanya dipegang oleh publik termasuk karyawan. Dalam kesempatan tersebut, PT Phapros diminta untuk lebih proaktif melakukan pemasaran dan juga edukasi masyarakat agar produknya seperti Antimo, X-Gra dan Livron B-Plex bisa lebih dikenal. Selain itu, PT Phapros agar lebih meningkatkan kegiatan komunikasi strategisnya agar perusahaannya dapat lebih dipercaya konsumen dan publik.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah melakukan pendalaman saat Kunjungan Kerja Reses ke Semarang (2 sd. 6 Mei 2023) disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Terkait Pelaksanaan Penugasan (Perpres 106/2022):

- a. Berdasarkan masukan dalam Kunres tersebut, beberapa kendala yang dihadapi pada umumnya berada di level kebijakan Pemerintah bukan di tingkat korporasi (perseroan) antara lain terkait dengan masih terkendalanya ekspansi Stasiun Kereta dan Pelabuhan Darat. Hal ini dinilai penting untuk diungkapkan, mengingat salah satu keunggulan yang ditawarkan kawasan Industri Terpadu Batang kepada calon investor adalah kecepatan dan efisiensi logistik, dimana syarat terpenuhinya hal tersebut adalah fasilitas transportasi darat dan laut untuk suplai bahan baku dan jangkauan ke pasar bagi investor (*Just in*

Time Delivery). Untuk itu, disarankan Komisi VI DPR RI dapat menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian BUMN.

- b. Progres Pengembangan Fase I (450 ha) mayoritas infrastruktur sudah selesai, perlu percepatan serah terima dan penyediaan SDM pengelola. Untuk itu disarankan Komisi VI DPR RI dapat mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk lebih proaktif melakukan percepatan serah terima.

Sebagai catatan, perkembangan investasi klaster I fase I, 13 investor telah memberikan konfirmasi untuk membangun fasilitas produksi senilai Rp. 7,1 triliun . Hal ini penting agar realisasi investasi yang berhasil dicapai pemerintahan Presiden Jokowi dapat langsung berdampak kepada penyerapan tenaga kerja terutama bagi masyarakat sekitar Kawasan Industri Tersebut.

- c. Komisi VI DPR RI dinilai perlu mendorong pemerintah agar mendesak investor segera merealisasikan pembangunan dan operasional pabrik pabriknya mengingat kondisi sewa lahan yang ditawarkan relatif sangat murah, dengan kondisi 5 tahun *Free Period* (gratis) untuk sewa jangka panjang dan 80 tahun masa sewa HGB diatas HPL. Sebab, jika tidak kunjung merealisasikan pembangunannya, maka lahan tersebut akan menjadi lahan yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang cukup lama.
- d. Dalam paparannya KITB menyatakan Pematangan Lahan Klaster 1 Fase 2 Tahap 2 (600 Ha) yang usulan konstruksinya direncanakan tahun 2023 – 2024, belum terlaksana mengingat adanya kendala biaya, dan rencananya KITB akan mencari dukungan pendanaan komersial. Komisi VI DPR RI dinilai perlu menanyakan hal tersebut kepada Menteri BUMN agar permasalahan pematangan lahan dapat segera diselesaikan

2. Aspek Korporasi:

- a. Komisi VI DPR RI dinilai perlu mendorong PT KITB untuk lebih

meningkatkan kegiatan pelatihan vokasi di wilayah sekitar Kawasan dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga kerja trampil dengan cara menggelar pelatihan dan Pendidikan vokasi. Hal ini penting agar tenaga kerja yang diisi bukan sekedar tenaga kerja kasar dan sekuriti melainkan tenaga administrasi hingga tingkat manajer. Dalam pelatihan Vokasi ini, PT KITB perlu didorong bekerjasama dengan Ormas besar seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

3. Aspek Kebijakan:

- a. Komisi VI DPR RI dinilai perlu mendorong Kementerian Investasi/BKPM agar mencari potensial investor untuk Kawasan Industri Terpadu Batang dari negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok dan South Afrika/Afrika Selatan) mengingat investor dari Kawasan tersebut saat ini dinilai lebih potensial dibandingkan dari Kawasan lain yang terdampak ekonominya akibat gejolak politik global.
- b. Terkait isu strategis terkait Kawasan Industri Batang, Komisi VI DPR RI dinilai perlu meminta Kementerian Investasi/BKPM lebih berhati-hati menghadapi isu “Global dan kebutuhan energi baru terbarukan” mengingat hal tersebut masih menjadi polemik di berbagai Kawasan lain di dunia terutama terkait dengan komitmen transisi energi batubara ke energi bersih *United Nations Climate Change Conference of Parties* (COP26).

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI
KE SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
TTD.**

**ARIA BIMA
A-189**

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI berfoto bersama sesuai diskusi pendalaman di Semarang, Provinsi Jawa Tengah



Diskusi pendalaman Tim Kunres Komisi VI DPR RI dengan Kawasan Industri Terpadu Batang dan progress PLTG Tambak Lorok PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Indonesia Power dan PT Phapros Tbk.

